

# Efektivitas Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang

Oleh:

Aprillia Maharani, Tri Yuniningsih, Titik Djumiarti  
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jalan Profesor Haji Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Fax (024) 7465405

## ABSTRACT

*This study attempts to analyze and describe the effectiveness of Social Services of Youth and Sports in the handling of street children in the City of Semarang. This research uses qualitative approach with descriptive method. The focus of this study include productivity, adaptation, motivation and the factors that influence the effectiveness of Social Services of Youth and Sports in the managing of street children. The results show that Social Service of Youth and Sports of Semarang City has quite effective in terms of fulfilling the basic needs which is shelter to protect the street children from harmful things, clothing for the street children including uniform, daily wear, also nutrition for the street children in form of food support. Advice that provided is the effectiveness of managing the street children needs to be improved by improving the equalization of services for the street children, improving the ability of the employee, and improving the socialization for the community about the managing of street children.*

**Keywords:** *Effectiveness, Social Services of Youth and Sports, Street Children*

## A. Latar Belakang

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus bangsa. Anak memerlukan kesempatan untuk dapat berkembang dan tumbuh secara optimal baik secara fisik mental maupun sosial untuk dapat memikul tanggung jawab tersebut. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 34 bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, mempunyai makna Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan tiap – tiap warga negaranya, termasuk anak.

Peraturan perundang – undangan tentang perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya

hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menurut Konsorsium Anak Jalanan Tahun 1996 di Ambarita, Sumatra Utara, anak jalanan dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

Pertama, anak perantauan atau mandiri yang ditandai dengan bekerja di jalanan, hidup sendiri jauh dari orangtua, sengaja merantau untuk mencari kerja, tempat tinggalnya tidak

menetap atau mengontrak rumah bersama temannya, waktunya dimanfaatkan untuk mencari uang; Kedua, anak bekerja di jalanan yang ditandai dengan pulang ke rumah, tinggal bersama orangtua atau saudara, waktu dimanfaatkan untuk mencari uang, ada yang masih sekolah, ada yang tidak sekolah;

Ketiga, anak jalanan asli yang ditandai dengan anak yang lepas dari ikatan keluarga, anak dari kelompok gelandangan, biasanya bekerja dengan target penghasilan untuk makan dan merokok, tinggalnya tidak menetap.

Menurut Kementrian Sosial Republik Indonesia, anak jalanan adalah anak yang melewati atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan kehidupan sehari – harinya di jalanan.

Definisi lain anak jalanan disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu anak jalanan merupakan anak yang menggunakan sebagian besar waktu mereka di jalanan. Sedangkan menurut PBB, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja, bermain dan melakukan aktivitas lain di jalanan.

Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial RI membagi kategori anak jalanan menjadi dua macam yaitu:

Pertama, anak jalanan yang hidup di jalanan yang ditandai dengan putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orangtua, meluangkan waktu sekitar 8 – 10 untuk bekerja dan sisanya menggelandang, pekerjaan mereka mengamen, mengemis, memulung dan yang sebangsa, rata-rata berusia di bawah umur 14 tahun, pada umumnya tidak ingin sekolah lagi;

Kedua, anak jalanan yang bekerja di jalanan yang ditandai dengan berhubungan tidak rutin dan tidak teratur dengan orangtua, berada di

jalanan sekitar 8 – 10 jam untuk bekerja. Menetap dikontrakan bersama teman-temannya, tidak sekolah lagi, pekerjaan mereka rata-rata sebagai penjual koran, pengasong, penyemir sepatu, pencuci mobil, pengelap kaca angkutan dan lain-lain, rata-rata usia mereka di bawah 16 tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak yang rata – rata berusia di bawah 16 tahun mencari nafkah di jalanan dengan menjual koran, makanan dan minuman, menyemir sepatu, mengelap kaca mobil atau angkutan, mengamen dan mengemis yang diantaranya ada yang tinggalnya tidak menetap, jauh dari orang tua, ada juga yang masih tinggal bersama orang tuanya namun kebanyakan dari mereka putus sekolah walaupun ada beberapa yang masih bersekolah.

Kualitas hidup anak jalanan sangat memprihatinkan. Hal ini dapat terlihat dari pakaian yang mereka gunakan begitu lusuh dan dekil, banyak yang tidur di kolong jembatan, emperan toko bahkan dalam gerbong bekas stasiun. Dari segi kesehatan dapat dilihat bahwa mandi bukan menjadi kegiatan utama dan kegiatan buang air besar maupun kecil juga bisa dilakukan di sembarang tempat.

Hidup di bawah garis kemiskinan menyebabkan keluarga miskin bersusah payah dalam pemenuhan kebutuhan mereka sehingga anak – anak dalam keluarga ikut membantu memenuhi perekonomian keluarga. Anak – anak tersebut berjualan koran, makanan, minuman ataupun sekedar meminta sedekah dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di jalanan.

Anak jalanan merupakan anak yang tersisihkan dari masyarakat karena ketidakmampuan mereka. Ketidakmampuan ekonomi dan pendidikan menjadi pendorong bagi mereka untuk mencari nafkah dan

hidup di jalanan. Pemenuhan kebutuhan yang sulit saat ini menyebabkan anak jalanan semakin sulit untuk membangun hidup mereka terlebih lagi tanpa ketrampilan.

Kebutuhan anak jalanan pada dasarnya sama dengan kebutuhan individu atau anak-anak pada umumnya. Kebutuhan yang paling mendesak dipenuhi adalah kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan serta kesehatan dan pendidikan.

Selain pelayanan kebutuhan dasar, anak jalanan juga membutuhkan perlindungan misalnya pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dari sesuatu yang membahayakan, pencegahan terhadap sesuatu yang dapat merugikan atau membahayakan anak dan pembinaan bagi anak jalanan baik secara mental, fisik dan sosial serta perlindungan hukum bagi anak jalanan yang memerlukan.

### **Jumlah Anak Jalanan Kota Semarang**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2012	270
2.	2013	350
3.	2014	400
4.	2015	458

Sumber: Disospora Kota Semarang  
Angka keberadaan anak jalanan di Kota Semarang yang cukup tinggi menjadi salah satu permasalahan sosial di dalam masyarakat. Hal tersebut menyebabkan adanya tekanan pada sektor publik untuk mengatasi permasalahan sosial ini.

Penanganan anak jalanan berbasis lembaga dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, berkedudukan sebagai instansi atau organisasi publik yang bertugas melaksanakan tugas urusan pemerintah daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan misi Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang yaitu meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS sebesar 20%, Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan di Kota Semarang.

Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga untuk menangani masalah ini, antara lain dengan upaya secara represif yaitu dengan melakukan penjaringan anak jalanan melalui razia yang dilakukan secara rutin bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam penjaringan tersebut, anak jalanan yang terjaring akan dibawa ke panti rehabilitasi untuk didata untuk dibina dan diidentifikasi minat didik dan latih mereka.

Setelah teridentifikasi, mereka yang memiliki minat didik dan latih akan disertakan dalam pelatihan sedangkan bagi yang tidak memiliki minat didik dan latih akan dikembalikan kepada orang tua ataupun daerah asal masing – masing.

Selain penanganan secara represif juga dilakukan penanganan secara preventif melalui kerjasama dengan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Bentuk kerjasama tersebut antara lain penyaluran bantuan pemerintah bagi anak – anak jalanan. Bantuan yang disalurkan antara lain modal ketrampilan berupa peralatan salon ataupun bengkel serta tunjangan bagi anak penerima manfaat yang telah terdaftar.

Namun dengan upaya – upaya tersebut, belum semua anak jalanan dapat ditangani secara baik. Tak jarang para anak jalanan yang sudah tertangani masih kembali menjadi anak jalanan.

Penyebab masih tingginya anak jalanan di Kota Semarang lainnya yaitu masih sulitnya anak jalanan untuk merubah *mindset*-nya sendiri. Mudahnya anak jalanan untuk mendapatkan penghasilan sendiri dengan cara mengamen, memintaminta, membersihkan kaca kendaraan menyebabkan anak jalanan tersebut akan sulit untuk menerima peraturan yang cukup mengekang dirinya apabila ia dibina di suatu panti.

Masyarakat juga dituntut turut andil dalam penanganan anak jalanan karena masih ada beberapa masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan meskipun sudah ada larangan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang memberikan beberapa pertimbangan permasalahan tersebut, penulis mengambil judul **“Efektivitas Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang”**.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis efektivitas Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dalam Penanganan anak jalanan serta mengidentifikasi faktor pendorong maupun penghambat efektivitas penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.

## **C. Teori**

### **Administrasi Publik**

Administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif (Pasolong, 2008:8).

### **Efektivitas Organisasi**

Banyak orang setuju bahwa manajemen memegang peranan utama dalam mencapai efektivitas tetapi sulit

untuk memperinci konsep efektivitas itu sendiri. Konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki.

Steers (1985:5) mengemukakan organisasi merupakan kesatuan yang kompleks yang berusaha mengalokasikan sumber dayanya demi tercapainya tujuan. Semakin besar kemajuan yang diperoleh ke arah tujuan maka organisasi semakin efektif pula. Dengan kata lain, efektivitas organisasi merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya.

Gibson (1985:27-30) mengemukakan efektivitas dalam konteks perilaku organisasi yaitu pencapaian tujuan yang berhubungan dengan persepsi individu, nilai – nilai, dan tindakan – tindakan saat bekerja dalam organisasi. Robbins (2008:29) mendefinisikan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat pencapaian organisasi yang dipengaruhi oleh perorangan, kelompok dan struktur dalam organisasi.

Agung Kurniawan (2005:109) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan pengertian efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang dipengaruhi oleh individu, kelompok maupun struktur dalam organisasi tersebut.

### **Pendekatan Efektivitas**

Steers (1985:5-7) mengemukakan pendekatan efektivitas terdiri dari 3 konsep yaitu :

1. Optimisasi tujuan, dalam pendekatan ini efektivitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya dalam usaha mengejar tujuan operasi dan operasionalnya. Jadi, efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuannya.
2. Perspektif sistem, melihat tujuan bukan sebagai akhir yang statis tapi melihat tujuan yang telah tercapai sebagai masukan baru untuk menentukan tujuan berikutnya.
3. Tekanan perhatian terhadap perilaku manusia, melihat bagaimana tingkah laku individu dan kelompok dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi.

Untuk menilai keefektifan suatu organisasi Robbins (1994:54) mengemukakan beberapa pendekatan antara lain :

1. Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*)  
Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (*ends*) daripada caranya (*means*).
2. Pendekatan sistem (*system approach*)  
Pendekatan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.

3. Pendekatan konstituensi-strategis (*strategic-constituencies-approach*)  
Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu di dalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.
4. Pendekatan nilai – nilai yang bersaing (*competing values approach*)  
Pendekatan ini mencoba mempersatukan ke tiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup di mana organisasi itu berada.

Gibson (1985:35) mengemukakan pendekatan efektivitas yaitu:

1. Pendekatan Tujuan  
Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas.
2. Pendekatan Teori Sistem.  
Teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-proses-pengeluaran dan beradaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi.
3. Pendekatan *Multiple Constituency*.  
Pendekatan ini adalah perspektif yang menekankan pentingnya hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individual dalam hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi.

### **Ukuran Efektivitas**

Menurut Steers (1985), pengukuran efektivitas organisasi sesungguhnya harus mencakup berbagai kriteria seperti : Kualitas, Produktivitas,

Adaptasi, Motivasi, Kepuasan, Keluar masuknya pekerja, Kemangkiran. Sedangkan kriteria efektivitas menurut Gibson (1985:33-35) yaitu :

- a. Produktivitas, mencerminkan kemampuan organisasi menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan oleh lingkungan.
- b. Efisiensi, mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya oleh organisasi.
- c. Kepuasan, ukuran untuk menunjukkan tingkatan organisasi memenuhi kebutuhan karyawannya.
- d. Keadaptasian, tingkat ketanggapan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.
- e. Pengembangan, kemampuan organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang serta memperbesar kesempatan kelangsungan hidup jangka panjang.

Ukuran efektivitas menurut Robbins (2008:29) yaitu :

1. Produktivitas, ukuran kinerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi.
2. Keabsenan, tidak melapor untuk bekerja.
3. Pengunduran diri, tingkat pengunduran diri permanen sukarela atau terpaksa dari organisasi.
4. Kewargaan organisasi, perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal namun mendukung berfungsinya organisasi.
5. Kepuasan kerja, sikap umum individu terhadap pekerjaannya.

Emitai Etzioni (Indrawijaya, 2010:187) mengemukakan pengukuran efektivitas organisasi mencakup 4 kriteria yaitu :

1. Adaptasi, kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara internal untuk menghadapi perubahan eksternal.
2. Integrasi, tingkat kemampuan organisasi mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan organisasi lainnya.
3. Motivasi, keterikatan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Produksi, jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

Steers (1985:8) juga mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu :

Kelompok pertama yaitu karakteristik organisasi yang terdiri dari struktur yaitu mengenai bagaimana cara orang – orang dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan teknologi merupakan variasi dalam proses mengubah masukan bagi organisasi yang dipakai untuk menunjang tercapainya sasaran organisasi.

Kelompok kedua yaitu karakteristik lingkungan yang mencakup dua aspek meliputi lingkungan ekstern merupakan semua kekuatan yang timbul di luar batas organisasi dan mempengaruhi kehidupan organisasi misalnya kondisi ekonomi dan peraturan pemerintah serta lingkungan intern merupakan segala hal yang berhubungan dengan iklim organisasi misalnya orientasi pekerja atas imbalan dan hukuman.

Kelompok ketiga yaitu karakteristik pekerja berkaitan dengan perbedaan peranan individu yang diberikan bagi

tercapainya tujuan organisasi. Setiap individu memiliki kemampuan dan sifat yang berbeda meskipun ditempatkan dalam lingkungan kerja yang sama.

Kelompok keempat yaitu kebijakan dan praktik manajemen berkaitan dengan bagaimana kepemimpinan, proses komunikasi, dan kebijakan yang berlaku mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

## **D. Metoda Penelitian**

### **1) Desain Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam metode ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan demikian data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan panduan wawancara (*interview guide*) meliputi transkrip interview (wawancara), catatan lapangan, foto dan dokumen pribadi.

### **2) Situs Penelitian**

Situs penelitian ini adalah di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.

### **3) Informan**

Informan, yaitu pegawai Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.

### **4) Jenis Data**

Jenis data yang digunakan meliputi data teks / tulisan, data statistik, data gambar dan kata-kata tertulis berupa hasil wawancara.

### **5) Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data yang dikumpulkan secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya buku, artikel,

dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

### **6) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan yang dilakukan untuk memperoleh data-data, peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Interview atau wawancara
- b. Dokumentasi
- c. Studi kepustakaan

### **7) Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

### **8) Kualitas Data**

Teknik untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan informan. Dengan cara, antara lain (Meoleong, 2007:33):

- a. Melakukan wawancara mendalam kepada informan.
- b. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan satu dengan yang lainnya dengan hasil observasi di lapangan.
- c. Mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-sumber lain.

## **E. PEMBAHASAN**

Efektivitas Disospora Kota Semarang dilihat dari 3 kriteria yaitu produktivitas, adaptasi, dan motivasi.

### **1. Produktivitas**

Produktivitas Disospora Kota Semarang dapat dilihat dari kegiatan – kegiatan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan yang dibutuhkan oleh anak jalanan.

Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Disospora Kota Semarang dilihat dari produk/jasa yang dihasilkan, kesesuaian target,

proses –proses yang digunakan, dan tanggapan dari penerima layanan.

Pelayanan yang diberikan Disospora Kota Semarang antara lain :

a. Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar

Kebutuhan sandang yang dipenuhi dengan terlaksananya program PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) berupa bantuan dana yang disalurkan melalui rekening anak. Kebutuhan pangan yaitu terlaksananya program bantuan pangan dalam rangka peningkatan gizi anak dengan pembagian susu. Kebutuhan papan dengan peningkatan sarana dan prasarana panti Among Jiwo sebagai panti rehabilitasi serta koordinasi dengan RPSA dan LKSA di Kota Semarang sebagai rumah singgah bagi anak jalanan.

b. Pelayanan pendidikan

Bentuk pelayanan pendidikan yang dipenuhi oleh Disospora Kota Semarang antara lain pendidikan pengetahuan melalui program kejar paket A, B, dan C yang setara dengan pendidikan SD, SMP, dan SMA.

Pendidikan ketrampilan melalui pelatihan ketrampilan bengkel, salon, tata boga, maupun pemanfaatan limbah plastik bungkus makanan, terlaksananya program UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang diharapkan dapat melatih anak berwirausaha, bantuan UEP dapat direalisasikan dalam bentuk warung sembako ataupun bentuk usaha produktif lainnya.

Pendidikan mental dan sosial dipenuhi Disospora Kota

Semarang dengan mengadakan pembinaan bagi anak jalanan dan orang tua anak jalanan serta anak dan orang tua di daerah rentan.

c. Pelayanan kesehatan

Bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Disospora Kota Semarang antara lain pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, sosialisasi hidup sehat dan rujukan perawatan di rumah sakit bagi anak yang membutuhkan. Pemeriksaan umum dan pemeriksaan gigi tidak dapat dilakukan secara merata dan rutin karena terbatasnya dana yang dimiliki oleh Disospora Kota Semarang.

d. Perlindungan

Bentuk perlindungan non-yuridis bagi anak yang diberikan oleh Disospora Kota Semarang berupa rumah singgah dan panti rehabilitasi. pengadaan rumah singgah dan panti sosial khusus anak di Kelurahan Rowosari belum dapat direalisasikan oleh Disospora Kota Semarang karena terbatasnya dana dan perijinan pembangunan yang sulit dari masyarakat sekitar.

Penyediaan rumah singgah diupayakan oleh Disospora Kota Semarang melalui koordinasi dan integrasi dengan RPSA dan LKSA di Kota Semarang. penyediaan panti rehabilitasi dilakukan oleh Disospora Kota Semarang dengan memanfaatkan Panti Among Jiwo sebagai UPTD yang berada di bawah Disospora Kota Semarang.

Penanganan anak jalanan Kota Semarang belum memiliki regulasi yang utuh karena belum adanya Peraturan



Walikota yang mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang penanganan anak jalanan.

Pendampingan hukum diberikan oleh lembaga swasta yaitu Yayasan Setara yang aktif dalam perlindungan anak.

## 2. Adaptasi

Menurut Casida (2007) kemampuan adaptasi organisasi dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu perubahan, berfokus pada pelanggan, dan keadaan organisasi. Perubahan Disospora Kota Semarang merupakan kemampuan Disospora untuk melakukan pembaharuan dan mampu mengikuti perkembangan terlihat dengan penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) setiap 5 (lima) tahun.

Renstra yang disusun oleh Disospora Kota Semarang memuat misi sebagai penjabaran visi yang dimiliki oleh Disospora Kota Semarang. Misi menjadi acuan bagi pegawai Disospora Kota Semarang dalam melaksanakan tugas, memberikan kontribusi yang sesuai dengan fungsinya demi tercapainya tujuan organisasi.

Disospora Kota Semarang sesuai dengan fungsinya melaksanakan kegiatan – kegiatan yang berfokus pada penanganan anak jalanan. Hal tersebut terlihat dari pelayanan yang diberikan kepada anak berupa kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan terhadap anak dan orang tua sebagai pendidik utama anak.

Keadaan organisasi merupakan proses yang mendukung Disospora Kota Semarang untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi serta tumbuh ke arah yang lebih baik.

Disospora Kota Semarang memberikan kesempatan bagi para

pegawainya untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti diklat umum maupun khusus yang diselenggarakan oleh Provinsi maupun daerah.

## 3. Motivasi

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi berhubungan dengan ketekunan pegawai Disospora Kota Semarang melaksanakan tugas demi mencapai tujuan organisasi.

Abraham Maslow (Ardana, Mujiati, dan Sriathi, 2009: 33) mengatakan bahwa dalam setiap diri manusia terdapat hierarki dari lima kebutuhan :

- a. Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*) pegawai Disospora Kota Semarang berupa makanan, pakaian perumahan dan kebutuhan fisik lainnya dapat dipenuhi dengan gaji yang diterima oleh para pegawai.
- b. Kebutuhan rasa aman (*safety needs*) pegawai Disospora Kota Semarang dipenuhi dengan adanya jaminan kesehatan dan jaminan hari tua yang diterima oleh pegawai Disospora Kota Semarang.
- c. Kebutuhan sosial (*social needs*) pegawai Disospora Kota Semarang terpenuhi dengan lingkungan kerja Disospora Kota Semarang yang cukup kondusif. Pegawai Disospora Kota Semarang dapat bekerja sama sebagai sebuah tim yang terbuka dengan rekan sebagai rekan kerja maupun *partner*. Para pegawai Disospora Kota Semarang terbuka terhadap saran dan masukan yang

diberikan oleh atasan maupun teman sekerja.

- d. Kebutuhan penghargaan diri (*self esteem needs*) dirasakan oleh pegawai Disospora Kota Semarang dengan adanya apresiasi dari atasan berupa ucapan selamat dan ucapan terima kasih setelah dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik namun belum ada apresiasi dalam bentuk fisik.
- e. Kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization*) diberikan kepada pegawai Disospora Kota Semarang dengan memberikan diklat bagi pegawai berupa diklat umum maupun diklat khusus yang diperuntukkan bagi jabatan tertentu baik bersala dari pusat maupun daerah.

Efektivitas penanganan anak jalanan oleh Disospora Kota Semarang juga dipengaruhi oleh :

- a. Karakteristik organisasi Disospora Kota Semarang menempatkan pegawai pada jabatan telah disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa spesialisasi pekerjaan telah dilakukan oleh Disospora Kota Semarang

Penempatan pegawai dalam jabatan – jabatan tertentu yang dilakukan oleh Disospora Kota Semarang dilakukan sesuai dengan kualifikasi/standar tertentu yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011.

Perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh Disospora Kota Semarang berupa komputer yang dapat dioperasikan oleh seluruh pegawai Disospora Kota Semarang dan *website* organisasi.

- b. Karakteristik lingkungan Dilihat dari lingkungan internal, adanya spesialisasi dan delegasi pekerjaan sesuai dengan tupoksi masing – masing pegawai dan formalisasi dalam Disospora Kota Semarang belum mampu menangani keluhan pegawai terhadap beban kerja yang besar.

Komunikasi dan koordinasi antar pegawai terjalin dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang besar karena pegawai Disospora Kota Semarang bersedia menerima masukan dan saran yang diberikan oleh atasan maupun teman sekerja sehingga tidak sampai menghambat kelangsungan organisasi.

Sedangkan dilihat dari lingkungan eksternal, Pelaksanaan penanganan anak jalanan oleh Disospora Kota Semarang telah dilakukan baik melalui pelayanan maupun perlindungan bagi anak jalanan tersebut namun, hal tersebut masih belum sepenuhnya dapat mengubah *mindset* anak jalanan. Hidup di jalanan dalam waktu lama membentuk karakter anak jalanan menjadi keras dan cuek serta anak jalanan merupakan anak – anak yang tertutup terhadap kehadiran orang baru sehingga

dalam penanganan anak jalanan tidak dapat dilakukan secara instan.

Masyarakat Kota Semarang mempunyai tanggung jawab juga dalam penanganan anak jalanan namun, dalam kesehariannya masyarakat pengguna jalan masih saja membeli koran, memberi sedekah kepada anak – anak di jalanan.

## **F. PENUTUP KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya mengenai analisis efektivitas penanganan anak jalanan oleh Disospora Kota Semarang, penulis dapat menyimpulkan bahwa Disospora cukup efektif dalam penanganan anak jalanan. Dalam pelayanan belum merata, kemampuan pegawai dalam bidang IPTEK belum maksimal dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanganan anak jalanan di Kota Semarang serta belum terlaksananya regulasi dalam penanganan anak jalanan.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka saran yang akan diberikan untuk memberikan masukan bagi peningkatan efektivitas Disospora Kota Semarang dalam penanganan anak jalanan :

1. Meningkatkan pemerataan pelayanan dengan meningkatkan integrasi dan koordinasi dengan pihak – pihak terkait.
2. Meningkatkan kemampuan pegawai Disospora Kota Semarang dengan pengadaan diklat di bidang IPTEK.
3. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Kota Semarang mengenai program penanganan anak jalanan, misalnya dengan bazar

amal yang menampilkan bakat dan ketrampilan anak jalanan.

4. Meningkatkan integrasi dan koordinasi dengan lembaga pemerintahan yang lain agar regulasi dalam penanganan anak jalanan dapat segera diimplementasikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Ardana, Komang. 2009. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djarmiko, Yayat Hayati. 2008. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Gibson, James L. 1985. *Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Husein, Umar. 2002. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Puataka Utama
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Kusnendi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PPUT.

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Cetakan Kedua. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mughron, Maulana Mufis. 2016. Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Siaga Bencana di Kota Semarang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Munir, Baderel. 2012. *Six Dimension Organization*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Permatasari, Intan. 2016. *Teori dan Penerapan Teori Motivasi*. Makalah. Institut Pertanian Bogor.

Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Indeks.

Siswanto & Agus Sucipto. 2008. *Teori & Perilaku Organisasi*. Cet.1. Malang: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI).

Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundangan:

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011

Disetujui oleh Dosen Pembimbing I Semarang, Juli 2016

Dra. Tri Yuniningsih, M.Si  
NIP. 19670602.1992003.2.001